

## Pejabat Tak Gunakan Fasilitas Negara .....

Dari Halaman 1

menggunakan fasilitas negara, seperti tidak menggunakan mobil dinas untuk keperluan pribadi, termasuk membawa keluarga atau saudara," paparnya.

"Bahkan, saya memilih tidak tinggal di rumah dinas, karena khawatir tamu-tamu pribadi saya menggunakan fasilitas negara seperti listrik dan

air," sambungnya.

Menag mengingatkan, dalam hidup ini yang sebenarnya dibutuhkan bukanlah harta melimpah atau jabatan tinggi, melainkan keberkahan. Kekayaan tidak ada artinya kalau keluarga tidak mendapat keberkahan.

"Apa gunanya kekayaan jika keluarga kita bermasalah, anak terjerumus narkoba, istri selingkuh, atau hidup penuh penyakit? Itu seperti neraka sebelum waktunya," ucap Menag.

Ia menyampaikan, ada hadis yang menyatakan bahwa setiap daging yang tumbuh dari barang haram hanya bisa dibersihkan oleh neraka. Bahkan siapapun yang memakan makanan haram, salatnya tidak akan diterima selama 40 hari.

"Jika setiap hari kita memakan yang haram, sia-sialah salat kita. Bagaimana mungkin anak kita menjadi anak yang sholeh jika makanan yang dikonsumsinya berasal dari yang haram?" pungkask Menag.(rm/js)

## THR PNS Cair .....

Dari Halaman 1

"Besaran dan mekanisme (THR) disampaikan oleh menaker (menteri ketenagakerjaan) melalui surat edaran," ujar Prabowo dalam konferensi pers, Senin (10/3).

Pada, pada tahun-tahun sebelumnya, PNS biasanya baru menerima hak THR mereka sekitar 10 hari sebelum hari raya (H-10 Lebaran).(cnni/js)

## Kemenkeu Siapkan .....

Dari Halaman 1

catat via DAK non fisik di APBN. Namun penyalurannya tidak lagi melalui APBD, tetapi langsung ke rekening masing-masing guru.

"Perubahan skema ini akan mempercepat penerimaan. Tunjangan akan lebih tepat waktu, akurat, dan terukur," katanya.

Suhasil mengatakan, anggaran TPG sebesar Rp66,9 triliun ditargetkan untuk 1,5 juta guru di 544 daerah. Pencapaian tahap pertama akan dilakukan Maret ini sebesar Rp1,25 triliun untuk 103.197 guru di 204 daerah.

"Tunjangan profesi guru adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang telah bersertifikasi. Besarannya adalah satu kali gaji pokok per bulan, sebagai penghargaan atas profesionalitasnya," katanya.(cnni/js)

## China, Rusia dan Iran .....

Dari Halaman 1

yang akan digelar pada Jumat (14/3).

Ikatan antara Iran dan Rusia menguat sejak pecahnya perang di Ukraina pada 2022 lewat penandatanganan kerja sama strategis pada Januari 2025. Keduanya pun diketahui memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan China.

Ketiga negara pada pekan ini menggelar latihan militer bersama di Teluk Oman. Latihan militer bersama itu memicu spekulasi sebagai respons atas ancaman Presiden AS Donald Trump terhadap Iran terkait program nuklir.

Juru bicara Kemenlu China Mao Ning pada Rabu (12/3/2025), menginformasikan bahwa, Wamenlu China Ma Zhaoxu akan menjadi tuan rumah pertemuan tersebut. Pertemuan bersamaan dengan dilgernya pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB di New York membahas isu pengayaan uranium Iran.

Kepala Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Rafael Mariano Grossi pada Senin (3/3) mengungkapkan bahwa, Iran saat ini mengalami lonjakan produksi uranium di level 60 persen. Iran diprediksi bisa meningkatkan pengayaan uraniumnya ke level bom nuklir atau 90 persen dan mampu memproduksi enam bom nuklir dalam waktu yang cepat.

"Merujuk laporan terakhir saya, stok uranium U-235 Iran meningkat hingga 60 persen telah bertambah 275 kilogram, naik 182 kilogram dalam tiga bulan terakhir. Iran satu-satunya negara non-nuklir yang melakukan pengayaan uranium pada level ini, membuat saya sangat khawatir," kata Grossi dalam sebuah pernyataan dikutip Anadolu.(rep/js)



## Menag: Cari Keberkahan

Dari Halaman 1

akan membawa kebahagiaan. Pernyataannya juga relevan dengan kondisi sosial saat ini, di mana banyak orang mengejar materi tanpa mempertimbangkan aspek halal dan berkahnya.

Hadis yang dikutip tentang makanan haram dan dampaknya terhadap ibadah menegaskan pentingnya mencari rezeki yang halal. Ini adalah pengingat bagi semua, terutama pejabat negara, untuk tidak tergoда mengambil hak yang bukan miliknya. Jika prinsip ini dijalankan oleh semua pejabat, tentu akan mengurangi korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Pernyataan Menag ini memiliki nilai edukatif dan dapat menjadi teladan bagi pejabat lain. Jika benar-benar konsisten dengan ucapannya, sikap ini bisa menjadi inspirasi dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Dalam ajaran Islam, imbauan untuk tidak menggunakan fasilitas negara secara pribadi, termasuk saat Lebaran, selaras dengan prinsip keadilan, amanah, dan larangan terhadap penyalahgunaan wewenang.

Islam menekankan bahwa jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Rasulullah bersabda: "Jika amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran" (HR. Bukhari).

Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dapat dianggap sebagai penyalahgunaan amanah yang telah diberikan.

Islam melarang keras mengambil hak milik umum untuk kepentingan pribadi. Rasulullah bersabda: "Barang siapa yang kami angkat menjadi pegawai untuk suatu tugas, lalu dia mengambil lebih dari yang seharusnya dia terima, maka itu adalah gholul (harta haram)." (HR. Abu Dawud & Ibnu Majah).

Dalam konteks ini, menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi bisa dikategorikan sebagai bentuk "gholul" atau penyalahgunaan harta publik.

Islam mengajarkan bahwa pemimpin harus berlaku adil dan tidak mengambil keistimewaan yang tidak diberikan kepada rakyatnya. Khalifah Umar bin Khattab bahkan pernah menegur gubernurnya yang hidup bermewah-mewahan di atas rakyatnya. Penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi saat Lebaran dapat melanggar prinsip keadilan ini.

Islam mendorong para pemimpin untuk hidup sederhana dan tidak berlebihan dalam menikmati fasilitas dunia-wi. Rasulullah dan para sahabat mencontohkan kehidupan yang jauh dari kemewahan, meskipun mereka memiliki akses terhadap kekayaan negara.

Dari sudut pandang Islam, imbauan untuk tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, termasuk saat Lebaran, sangat sesuai dengan ajaran Islam tentang amanah, keadilan, dan larangan terhadap penyalahgunaan harta publik. Jika para pejabat mematuhi prinsip ini, maka akan semakin mendekatkan mereka pada nilai-nilai Islam yang sesungguhnya.

## Puncak Lonjakan Arus Mudik .....

Dari Halaman 1

Dudy memaparkan, pemudik yang akan melakukan perjalanan pada hari puncak arus mudik tersebut akan menuju ke wilayah

Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dari sekitar wilayah Jakarta.

Adapun untuk persentase pemudik yang menaiki kendaraan pribadi untuk mudik, Dudy menyebutkan sekitar 10,3 persen atau 3,47 juta orang bakal menggunakan mobil.

Sementara 8,5 persen atau 1,08 juta orang akan menaiki motor.

"Puncak arus balik diprediksi diperkirakan terjadi pada H+5 setelah libur Lebaran yakni Minggu, 6 April 2025," demikian Dudy.(rm/js)

## Ahok Diperiksa Kejagung .....

Dari Halaman 1

"Ditanya 17 atau 20 pertanyaan," ujarnya kepada wartawan di lokasi usai diperiksa, Kamis (13/3).

Dalam pemeriksaan itu, Ahok juga mengaku kaget lantaran penyidik telah memiliki data yang jauh lebih banyak dan tidak diketahui dirinya selaku mantan Komisaris Utama PT Pertamina.

"Ternyata, dari kejaksan agung, mereka punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu, ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu sudah sekepala," ujarnya kepada wartawan.

"Saya juga kaget-kaget, dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan transfer seperti apa, dia (penyidik) jelasin," imbuhnya.

Ahok mengaku pengetahuannya terkait PT Pertamina Patra Niaga tidak sampai sejauh itu lan-

taran dirinya sebagai Komisaris Utama Pertamina hanya bisa memonitoring lewat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Sementara, kata dia, pemufakatan jahat korupsi yang ada terjadi pada level operasional Pertamina Patra Niaga selaku Subholding.

"Selama saya di sana jadi kita nggak tahu tuh, ternyata dibawah ada apa, kita nggak tahu," jelasnya.

"Saya juga kaget-kaget gitu. Kok gila juga ya saya bilang gitu ya, saya kok nggak tahu itu, ini wajar kita enggak tahu, karena kita di atas," pungkasknya.

Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan sembilan orang tersangka yang terdiri dari enam pegawai Pertamina dan tiga pihak swasta. Salah satunya yakni Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.

Kejagung menyebut total kerugian kuasa

negara dalam perkara korupsi ini mencapai Rp193,7 triliun. Rinciannya yakni kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp35 triliun, kemudian kerugian impor minyak mentah melalui DMUT/Broker sekitar Rp2,7 triliun.

Selain itu kerugian impor BBM melalui DMUT/Broker sekitar Rp9 triliun; kerugian pemberian kompensasi (2023) sekitar Rp126 triliun; dan kerugian pemberian subsidi (2023) sekitar Rp21 triliun.

Kejagung menyebut sembilan tersangka itu bersekongkol untuk melakukan impor minyak mentah tidak sesuai prosedur dan mengolah dengan prosedur yang tidak semestinya.

Perbuatan para tersangka itu disebut menyebabkan kenaikan harga bahan bakar minyak yang akan dijual ke masyarakat. Sehingga, pemerintah perlu memberikan kompensasi subsidi yang lebih tinggi bersumber dari APBN.(cnni/js)



## Perusahaan Truk Ancam Mogok .....

Dari Halaman 1

melarang truk melintas di jalan tol saat momen mudik Lebaran.

Pemerintah melarang truk masuk jalan tol selama 16 hari, mulai 24 Maret hingga 8 April.

Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aprindo) Gemilang Tarigan menilai larangan truk masuk tol selama 16 hari terlalu lama. Kebijakan itu dinilai akan merugikan para pengusaha truk angkutan barang.

"Kami akan protes dengan setop operasi tanggal 20 (Maret). Di Jakarta anggota kami ada 950 perusahaan," kata Gemilang melalui pesan singkat, dilansir dari CNNIndonesia.com, Kamis (13/3).

"Sekalian, supaya pemerintah tahu apa dampaknya kalau kita semua mogok beroperasi saat itu. Sekalian hancur-hancuran lah," ujarnya.

Wakil Ketua Bidang Angkutan Distribusi dan Logistik Aprindo DPD Jateng dan DIY Agus Pratiknyo menyebut aturan ini bisa berdampak terhadap iklim bisnis dunia angkutan barang.

Menurutnya, banyak sopir truk yang tidak bisa makan karena larangan truk masuk tol lebih dari dua minggu. Selain itu, larangan ini bakal membuat para pengusaha gagal membayar cicilan truk.

"Kami mengusulkan pelarangan itu hanya dari tanggal 27 Maret sampai 3 April saja sudah cukup. Itu menurut kami yang wajar. Kenapa? Kami juga mempertimbangkan para pekerja, pengemudi, buruh bongkar muat, di mana mereka sangat bergantung kepada pendapatan harian," ucap Agus.

Senada dengan Aprindo, Perkumpulan Pelaku Logistik Indonesia (PPLI) juga memprotes kebijakan tersebut. Ketua Kabid Darat DPP PPLI Teguh Hariyanto menilai pelarangan truk melintas tol selama 16 hari keterlaluannya dan serampangan.

"Larangan yang ugal-ugalan," katanya.

Ia mengingatkan larangan ini bakal memukul para sopir truk. Peluang mereka mencari nafkah ditutup demi menyenangkan sebagian masyarakat. Teguh lantas mempertanyakan apakah pemerintah mau bertanggung jawab atas penghasilan sopir yang terancam hilang selama Lebaran.

"Memang pemerintah mau kasih uang pengganti kalau sopir tidak kerja, tidak ada pendapatan selama 16 hari? Ini kok enggak dipikir sama sekali," pungkasknya.

Sebelumnya, pemerintah melarang truk sumbu tiga melintas di tol selama arus mudik dan balik Lebaran 2025. Peraturan itu berlaku 24 Maret hingga 8 April.

Pelarangan truk masuk tol akan berlaku di

ruas jalan tol di Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan, Jakarta-Banten, Jakarta, Jakarta-Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat-Jawa Tengah, Jawa Tengah, serta Jawa Timur.

Lalu ada beberapa ruas jalan non-tol yang juga memberlakukan larangan ini, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Jambi dan Sumatera Barat, Jambi-Sumatera Selatan-Lampung, dan Jakarta-Banten.

Kemudian, Jakarta-Jawa Barat-Bekasi-Cikampek-Pamanukan-Cirebon, Jawa Barat, Jawa Barat-Jawa Tengah, Cirebon-Brebes, Jawa Tengah, Jawa Tengah-Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali serta Kalimantan Tengah.

"Hal tersebut untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran, serta mengoptimalkan lalu lintas angkutan jalan dan penyeberangan selama masa arus mudik dan arus balik angkutan Lebaran 2025," kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Budi Rahardjo melalui keterangan tertulis.

Namun, pemerintah membuat pengecualian untuk truk pengangkut BBM atau BBG, hantaran uang, hewan dan pakan ternak, pupuk, penanganan bencana alam, sepeda motor mudik dan balik gratis, serta bahan pokok.

"Logistik adalah prioritas, tidak ada larangan atau pembatasan sehingga pasokannya tetap aman," imbuhnya.(cnni/js)

## "Aku Sedang Berpuasa" .....

Dari Halaman 1

yang harus sejalan dengan ibadah lainnya. Jika seseorang puasa tapi meninggalkan shalat, nilai puasanya pun berkurang.

"Betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain rasa lapar dan dahaga." (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan al-Hakim)

Hadis ini menunjukkan bahwa puasa bukan hanya soal menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menjaga akhlak, niat, dan hati. Jika seseorang berpuasa tetapi masih berkata kasar, berbohong, bergosip, atau menyakiti orang lain, puasanya kehilangan makna spiritualnya.

Puasa seharusnya bukan hanya fisik, tetapi juga batin. Jika seseorang terus melihat hal-hal yang diharamkan, iri hati, atau berniat buruk, maka puasanya hanya sekadar menahan lapar dan haus.

Jika seseorang berpuasa hanya karena kebiasaan atau sekadar ikut-ikutan tanpa niat ibadah, maka puasanya kehilangan nilai spiritualnya.

Puasa yang benar seharusnya menahan diri dari segala bentuk dosa, baik yang kecil maupun besar. Jika seseorang tetap melakukan maksiat saat berpuasa, ibadahnya menjadi kurang bernilai. Intinya, puasa yang sempurna bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menjaga hati, akhlak, dan hubungan dengan Allah serta sesama manusia.

Meskipun tidak mudah, puasa juga memberikan manfaat luar biasa—baik secara spiritual, mental, maupun fisik. Dengan niat yang benar dan usaha sungguh-sungguh, puasa bisa menjadi sarana untuk membersihkan hati, melatih kesabaran, dan mendekatkan diri kepada Allah. Itulah mengapa dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa puasa diwajibkan agar manusia bertakwa (QS. Al-Baqarah: 183).

Puasa memang diwajibkan bagi orang-orang yang beriman, seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 183: "Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa."

Ayat ini menunjukkan bahwa hanya orang-orang yang memiliki iman yang akan menjalankan puasa dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Sebab, puasa bukan sekadar menahan lapar dan haus, tetapi juga bentuk ketataan kepada Allah, ujian kesabaran, dan cara untuk meningkatkan ketakwaan.

Orang yang tidak beriman mungkin bisa berpuasa secara fisik, tetapi tanpa keyakinan kepada Allah, mereka tidak akan mendapatkan nilai spiritual dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Puasa menjadi ibadah yang berat bagi yang tidak beriman, tetapi menjadi latihan jiwa yang bermakna bagi orang-orang beriman.